

## ANALISIS RASIO KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PALEMBANG PADA TAHUN 2016-2020

**Aditya Mahendra, Faridah, Anggeraini Oktarida**

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email : mahendra.am12@gmail.com, faridahcute\_iryani@yahoo.com,

anggeraini\_oktarida@polsri.ac.id

---

### INFO ARTIKEL

Diterima  
19 Juli 2022  
Direvisi  
13 Agustus 2022  
Disetujui  
23 Agustus 2022

---

### Kata kunci:

Kondisi Keuangan, Rasio,  
Dimensi, Indeks Komposit

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap rasio kondisi keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang pada tahun 2016 sampai 2020. Model enam dimensi yang dikonsepsi dan dikembangkan oleh Ritonga pada tahun 2014 digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang memiliki solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, dan fleksibilitas keuangan yang baik karena memiliki aset lancar, aset, jumlah pendapatan, dan kapasitas pendapatan yang dinilai masih memadai. Tetapi, memiliki kemandirian keuangan yang masuk dalam kategori sedang karena masih bergantung pada sumber pendanaan di luar kendalinya. Kemudian, untuk solvabilitas layanan belum dapat dinilai tingkatannya karena belum adanya batasan yang jelas yang dapat membedakan kondisi yang baik dan kurang baik. Namun, apabila nilai dari rasio solvabilitas layanannya semakin tinggi, maka kondisi dari solvabilitas layanannya akan semakin baik juga.

---

### Keywords :

*Financial Condition, Ratio,  
Dimensions, Composite  
Index*

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the ratio of local government financial conditions in the city of Palembang in 2016 to 2020. The six-dimensional model conceptualized and developed by Ritonga in 2014 was used in this study. This study uses a quantitative approach with quantitative descriptive methods. The results of the study indicate that the local government of Palembang city has short-term solvency, long-term solvency, budget solvency, and good financial flexibility because it has current assets, assets, total income, and income capacity which are considered adequate. However, having financial independence is in the moderate category because it still depends on funding sources*

*outside its control. Then, the level of solvency of services cannot be assessed because there is no clear boundary that can distinguish good and bad conditions. However, if the value of the solvency ratio of the service gets higher, then the condition of the solvency of the service will also get better.*

## **Pendahuluan**

Pengelolaan keuangan merupakan satu hal dari bagian otonomi daerah, yang dapat memberikan hak-hak untuk mengelola atas pendapatan, belanja, dan pendanaan kepada pemerintah daerah (Sudaryo et al., 2021). Hal ini mengakibatkan pemerintah pusat harus mendistribusikan lebih dari 30 persen dari total anggarannya kepada pemerintah daerah melalui dana desentralisasi yang meningkat secara signifikan (Ritonga, 2014). Dalam desentralisasi atas pengelolaan keuangan tadi bukan aturan rinci yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya, melainkan hanya prinsip-prinsip atas pengelolaan keuangan daerah (Simanjuntak, 2015). Hal ini menyebabkan adanya variasi dari kondisi keuangan antar pemerintah daerah.

Kondisi keuangan yang bervariasi ini telah menciptakan sebuah kebutuhan bagi para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen pusat serta daerah, dan masyarakat untuk memiliki instrumen yang efektif untuk memantau tingkat kesehatan dari berbagai macam pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Tidak hanya sebatas itu saja, pihak-pihak berkepentingan juga perlu tahu faktor apa saja yang menentukan variasi dari kondisi keuangan ini. Karena itulah, terjadi peningkatan kebutuhan mengenai informasi kondisi keuangan di Indonesia saat ini (Ritonga, 2014). Informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi keuangan ini dapat diperoleh melalui laporan keuangan pemerintah daerah (Sofyan, 2019).

Laporan keuangan ini menginformasikan kepada para penggunanya mengenai nilai dari total aktiva, total utang, total aktiva bersih, total pendapatan, total pengeluaran dan arus kas masuk dan arus kas keluar (Yuliani & Agustini, 2016). Walaupun begitu, hingga saat ini pada laporan keuangan yang telah diaudit masih belum memberikan gambaran dari kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah kepada para penggunanya.

**Tabel 1**  
**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**  
**Kota Palembang Pada Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Opini BPK</b>
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber: LHP atas LKPD Kota Palembang Tahun 2016-2020*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Kota Palembang mendapatkan predikat WTP atas pemeriksaan pada laporan keuangannya yang

dilakukan oleh BPK. Menurut (Selatan, 2020) Opini WTP memberikan keterangan bahwa suatu entitas yang telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangannya telah menyajikan hal-hal yang material, arus kas, posisi keuangan, dan hasil usahanya secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Ritonga, 2014) bahwa walaupun laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang telah selesai dilaksanakan, akan tetapi di dalam laporan hasil pemeriksaan ini tidak menginformasikan mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah pada periode yang bersangkutan.

Hasil penelitian (Primawaty, 2017), menunjukkan bahwa adanya perbedaan atas kondisi keuangan dari setiap tipe pemerintahan berdasarkan model enam dimensi yang dikembangkan oleh (Ritonga, 2014). Setelah dilakukan proses analisis didapatkan kesimpulan bahwa walaupun sebuah pemerintah daerah telah mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangannya, namun kondisi keuangan dari pemerintah daerah tersebut tidak termasuk sebagai kategori yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas analisis penelitian atas kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang ini memiliki tujuan untuk mengetahui nilai rasio kondisi keuangan pada pemerintah daerah Kota Palembang pada tahun 2016-2020 dengan menggunakan model analisis enam dimensi yang telah dikonsepsi dan dikembangkan oleh (Ritonga, 2014). Di dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang akan dijawab yaitu "Bagaimana nilai dari rasio kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang pada tahun 2016-2020.

## Metode

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran atas rasio kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang. Menurut (Sugiyono, 2018), metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan filsafat positivisme sebagai landasannya yang digunakan untuk meneliti atas populasi dan sampel tertentu. Instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data, kemudian analisis data dari penelitian kuantitatif bersifat statistik yang dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Data sekunder ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kota Palembang pada tahun 2016-2020 yang diperoleh melalui laman website <https://www.bpk.go.id/>. Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP dari BPK, hal ini dilakukan agar data yang akan diteliti dapat memenuhi unsur validitas dan ketepatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Jusup, 2011). LKPD yang sudah diaudit secara umum adalah LKPD yang bisa diandalkan karena telah melalui proses audit dari instansi yang independen. Data publikasi mengenai jumlah penduduk yang diperoleh dari laman website <https://sumsel.bps.go.id/> juga digunakan pada penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Hasil Perhitungan Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Palembang

##### a. Solvabilitas Jangka Pendek

**Tabel 1**  
**Rasio Solvabilitas Jangka Pendek**  
**di Kota Palembang Tahun 2016-2020**

Tahun	Solvabilitas Jangka Pendek		
	Rasio A	Rasio B	Rasio C
2016	0,18	2,06	1,70
2017	0,74	4,77	3,94
2018	0,22	1,98	1,56
2019	0,18	1,46	1,00
2020	0,20	1,94	1,46

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Tabel 1 menggambarkan bahwa tingkat rasio solvabilitas jangka pendek di Kota Palembang bersifat fluktuatif. Dari setiap rasio baik rasio A, rasio B, dan rasio C dapat dilihat bahwa tingkat rasio solvabilitas jangka pendek paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan nilai secara berturut-turut 0,74; 4,77; dan 3,94. Kemudian, nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2019 pada setiap rasio yaitu secara berturut-turut sebesar 0,18; 1,46; dan 1,00.

##### b. Solvabilitas Jangka Panjang

**Tabel 2**  
**Rasio Solvabilitas Jangka Panjang**  
**di Kota Palembang Tahun 2016-2020**

Tahun	Solvabilitas Jangka Panjang
	Rasio B
2016	21,30
2017	102,70
2018	43,15
2019	52,75
2020	65,21

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Tabel 2 menggambarkan bahwa tingkat rasio solvabilitas jangka panjang di Kota Palembang bersifat fluktuatif. Dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan nilai rasio solvabilitas jangka panjang pada tahun 2017 dengan nilai 102,70 yang merupakan nilai tertinggi. Sedangkan nilai rasio paling rendah berada pada tahun 2016 dengan nilai 21,30

##### c. Solvabilitas Anggaran

**Tabel 3**  
**Rasio Solvabilitas Anggaran**  
**di Kota Palembang Tahun 2016-2020**

Tahun	Solvabilitas Anggaran			
	Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D
2016	1,17	1,17	1,66	1,07

2017	1,31	1,31	2,11	1,09
2018	1,14	1,14	1,98	1,00
2019	1,26	1,26	2,28	1,00
2020	1,16	1,19	2,10	1,00

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Tabel 3 menggambarkan bahwa tingkat rasio solvabilitas anggaran di Kota Palembang bersifat fluktuatif. Dapat dilihat bahwa nilai rasio solvabilitas anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai rasio A, rasio B, rasio C, maupun rasio D secara berturut-turut 1,31; 1,31; 2,11; dan 1,09. Kemudian, nilai rasio paling rendah terjadi pada tahun 2016 dengan nilai secara berturut-turut 1,17; 1,17; 1,66; dan 1,07.

#### d. Kemandirian Keuangan

**Tabel 4**  
**Rasio Kemandirian Keuangan**  
**di Kota Palembang Tahun 2016-2020**

Tahun	Kemandirian Keuangan	
	Rasio A	Rasio B
2016	0,25	0,27
2017	0,32	0,35
2018	0,27	0,27
2019	0,27	0,27
2020	0,28	0,28

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Tabel 4 menggambarkan bahwa tingkat rasio kemandirian keuangan di Kota Palembang bersifat fluktuatif. Dapat dilihat bahwa dari setiap rasio, baik rasio A maupun rasio B nilai tertinggi rasio kemandirian keuangan berada pada tahun 2017 yaitu dengan nilai secara berturut-turut 0,32 dan 0,35. Kemudian, nilai rasio paling rendah berada pada tahun 2016 dengan nilai secara berturut-turut 0,25 dan 0,27.

#### e. Fleksibilitas Keuangan

**Tabel 5**  
**Rasio Fleksibilitas Keuangan**  
**di Kota Palembang Tahun 2016-2020**

Tahun	Fleksibilitas Keuangan	
	Rasio B	Rasio D
2016	3,10	7,78
2017	11,93	22,64
2018	4,46	9,03
2019	6,51	11,62
2020	6,00	11,46

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Tabel 5 menggambarkan bahwa tingkat rasio fleksibilitas keuangan di Kota Palembang bersifat fluktuatif. Dari setiap rasio baik rasio B dan rasio D dapat dilihat bahwa nilai tertinggi rasio fleksibilitas keuangan terjadi pada tahun 2017, yaitu dengan nilai secara berturut-turut 11,93 dan 22,64.

Kemudian, nilai rasio paling rendah berada pada tahun 2016 dengan nilai secara berturut-turut 3,10 dan 7,78.

#### f. Solvabilitas Layanan

**Tabel 6**  
**Rasio Solvabilitas Layanan**  
**di Kota Palembang Tahun 2016-2020**

Tahun	Solvabilitas Layanan				
	Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D	Rasio F
2016	4.457.563,70	4.677.139,63	3.604.746,49	1.820.122,91	360.594,09
2017	8.264.906,82	8.346.174,50	7.268.230,86	1.935.709,81	528.060,91
2018	8.492.001,15	8.693.479,34	7.564.998,48	2.111.710,90	515.400,02
2019	9.538.491,54	9.722.824,51	6.882.916,73	2.370.149,81	666.516,17
2020	10.886.982,32	11.056.522,77	8.187.226,10	2.209.992,85	530.823,73

*Sumber: Data yang diolah, 2022*

Tabel 6 menggambarkan bahwa tingkat rasio solvabilitas layanan di Kota Palembang bersifat fluktuatif. Nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan nilai secara berturut-turut 10.886.982,32; 11.056.522,77; 8.187.226,10; 2.209.992,85; dan 530.823,73. Kemudian, nilai rasio paling rendah berada pada tahun 2016 dengan nilai secara berturut-turut 4.457.563,70; 4.677.139,63; 3.604.746,49; 1.820.122,91; 360.594,09.

## 2. Statistik Deskriptif

### a. Solvabilitas Jangka Pendek

**Tabel 7**  
**Statistik Deskriptif Rasio Solvabilitas Jangka Pendek**

	Rasio_A	Rasio_B	Rasio_C
N Valid	5	5	5
Missing	6	6	6
Mean	.3040	2.4420	1.9320
Median	.2000	1.9800	1.5600
Std. Deviation	.24429	1.32243	1.15279
Skewness	2.211	2.052	1.936
Std. Error of Skewness	.913	.913	.913
Kurtosis	4.907	4.438	4.092
Std. Error of Kurtosis	2.000	2.000	2.000
Minimum	.18	1.46	1.00
Maximum	.74	4.77	3.94

*Sumber: Data diolah dengan SPSS 25(2022)*

Tabel 7 menggambarkan bahwa data untuk rasio A, rasio B, dan rasio C tidak terdistribusi dengan normal, hal ini ditunjukkan oleh nilai *skewness* dan *kurtosis* pada perhitungan statistik tersebut. Data dapat dianggap berdistribusi dengan normal jika memiliki nilai *skewness* 0 dan *kurtosis* 3 (Ritonga, 2014). Nilai *skewness* secara berturut-turut untuk rasio A, rasio B, dan rasio C yaitu sebesar 2,211; 2,052; dan 1,936. Selain itu, nilai-nilai *kurtosis* untuk ketiga

rasio ini secara berturut-turut adalah sebesar 4,907; 4,438; dan 4,092. Karena data dinilai tidak berdistribusi dengan normal, maka nilai median merupakan nilai statistik yang tepat untuk merepresentasikan populasi (Kamnikar et al., 2006).

**b. Solvabilitas Jangka Panjang**

**Tabel 8**  
**Statistik Deskriptif Rasio Solvabilitas Jangka Panjang**

Statistics		
		Rasio_B
N	Valid	5
	Missing	6
Mean		57.0220
Median		52.7500
Std. Deviation		30.16731
Skewness		.721
Std. Error of Skewness		.913
Kurtosis		1.091
Std. Error of Kurtosis		2.000
Minimum		21.30
Maximum		102.70

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25(2022)

Tabel 8 menggambarkan bahwa data untuk rasio B tidak terdistribusi dengan normal, hal ini ditunjukkan oleh nilai *skewness* dan *kurtosis* pada perhitungan statistik tersebut. Data dapat dianggap berdistribusi dengan normal jika memiliki nilai *skewness* 0 dan *kurtosis* 3 (Ritonga, 2014). Nilai *skewness* untuk rasio B yaitu sebesar 0,721. Selain itu, nilai *kurtosis* untuk rasio ini adalah sebesar 1,091. Karena data dinilai tidak berdistribusi dengan normal, maka nilai median merupakan nilai statistik yang tepat untuk merepresentasikan populasi (Kamnikar et al., 2006).

**c. Solvabilitas Anggaran**

**Tabel 9**  
**Statistik Deskriptif Rasio Solvabilitas Anggaran**

Statistics		Rasio_ARasio_BRasio_CRasio_D			
N	Valid	5	5	5	5
	Missing	6	6	6	6
Mean		1.2080	1.2140	2.0260	1.0320
Median		1.1700	1.1900	2.1000	1.0000
Std. Deviation		.07328	.06950	.23082	.04438
Skewness		.764	.593	-1.075	.723
Std. Error of Skewness		.913	.913	.913	.913
Kurtosis		-1.744	-1.384	1.771	-2.670
Std. Error of Kurtosis		2.000	2.000	2.000	2.000
Minimum		1.14	1.14	1.66	1.00
Maximum		1.31	1.31	2.28	1.09

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25(2022)

Tabel 9 menggambarkan bahwa data untuk rasio A, rasio B, rasio C, dan rasio D tidak terdistribusi dengan normal, hal ini ditunjukkan oleh nilai *skewness* dan kurtosis pada perhitungan statistik tersebut. Data dapat dianggap berdistribusi dengan normal jika memiliki nilai *skewness* 0 dan kurtosis 3 (Ritonga, 2014). Nilai *skewness* secara berturut-turut untuk rasio A, rasio B, rasio C, dan rasio D yaitu sebesar 0,764; 0,593; -1,075; dan 0,723. Selain itu, nilai-nilai kurtosis untuk keempat rasio ini secara berturut-turut adalah sebesar -1,744; -1,384; 1,771; dan -2,670. Karena data dinilai tidak berdistribusi dengan normal, maka nilai median merupakan nilai statistik yang tepat untuk merepresentasikan populasi (Kamnikar et al., 2006).

#### d. Kemandirian Keuangan

**Tabel 10**  
**Statistik Deskriptif Rasio Kemandirian Keuangan**

		Statistics	
		Rasio_A	Rasio_B
N	Valid	5	5
	Missing	6	6
Mean		.2780	.2880
Median		.2700	.2700
Std. Deviation		.02588	.03493
Skewness		1.228	2.154
Std. Error of Skewness		.913	.913
Kurtosis		2.399	4.678
Std. Error of Kurtosis		2.000	2.000
Minimum		.25	.27
Maximum		.32	.35

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25(2022)(Priyatno, 2018)

Tabel 10 menggambarkan bahwa data untuk rasio A dan rasio B tidak terdistribusi dengan normal, hal ini ditunjukkan oleh nilai *skewness* dan kurtosis pada perhitungan statistik tersebut. Data dapat dianggap berdistribusi dengan normal jika memiliki nilai *skewness* 0 dan kurtosis 3 (Ritonga, 2014). Nilai *skewness* secara berturut-turut untuk rasio A dan rasio B yaitu sebesar 1,228 dan 2,154. Selain itu, nilai-nilai kurtosis untuk kedua rasio ini secara berturut-turut adalah sebesar 2,399 dan 4,678. Karena data dinilai tidak berdistribusi dengan normal, maka nilai median merupakan nilai statistik yang tepat untuk merepresentasikan populasi (Kamnikar et al., 2006).

#### e. Fleksibilitas Keuangan

**Tabel 11**  
**Statistik Deskriptif Rasio Fleksibilitas Keuangan**

		Statistics	
		Rasio_B	Rasio_D
N	Valid	5	5
	Missing	6	6
Mean		6.4000	12.5060
Median		6.0000	11.4600
Std. Deviation		3.36922	5.89480

Skewness	1.371	1.813
Std. Error of Skewness	.913	.913
Kurtosis	2.360	3.588
Std. Error of Kurtosis	2.000	2.000
Minimum	3.10	7.78
Maximum	11.93	22.64

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25(2022)

Tabel 11 menggambarkan bahwa data untuk rasio B dan rasio D tidak terdistribusi dengan normal, hal ini ditunjukkan oleh nilai *skewness* dan kurtosis pada perhitungan statistik tersebut. Data dapat dianggap berdistribusi dengan normal jika memiliki nilai *skewness* 0 dan kurtosis 3 (Ritonga, 2014). Nilai *skewness* secara berturut-turut untuk rasio B dan rasio D yaitu sebesar 1,371 dan 1,813. Selain itu, nilai-nilai kurtosis untuk kedua rasio ini secara berturut-turut adalah sebesar 2,360 dan 3,588. Karena data dinilai tidak berdistribusi dengan normal, maka nilai median merupakan nilai statistik yang tepat untuk merepresentasikan populasi (Kamnikar et al., 2006).

#### f. Solvabilitas Layanan

**Tabel 12**  
**Statistik Deskriptif Rasio Solvabilitas Layanan**

Statistics					
	Rasio_A	Rasio_B	Rasio_C	Rasio_D	Rasio_F
N Valid	5	5	5	5	5
Missing	6	6	6	6	6
Mean	8327989.10608499228	15006701623.73202089537	2560520278.9840		
Median	8492001.15008693479	34007268230.86002111710	9000528060.9100		
Std. Deviation	2399210.003	2382564.974	1795618.960	217940.1288	108489.7855
Skewness	-1.190	-1.148	-1.842	.027	-.308
Std. Error of Skewness	.913	.913	.913	.913	.913
Kurtosis	2.165	2.024	3.725	-1.218	1.994
Std. Error of Kurtosis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Minimum	4457563.70	4677139.63	3604746.49	1820122.91	360594.09
Maximum	10886982.32	11056522.77	8187226.10	2370149.81	666516.17

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25(2022)

Tabel 12 menunjukkan bahwa data untuk rasio A, rasio B, rasio C, rasio D, dan rasio F tidak terdistribusi dengan normal, hal ini ditunjukkan oleh nilai *skewness* dan kurtosis pada perhitungan statistik tersebut. Data dapat dianggap berdistribusi dengan normal jika memiliki nilai *skewness* 0 dan kurtosis 3 (Ritonga, 2014). Nilai *skewness* secara berturut-turut untuk rasio A, rasio B, rasio C, rasio D, dan rasio F yaitu sebesar -1,190; -1,148; -1,842; 0,27; dan -0,308. Selain itu, nilai-nilai kurtosis untuk kelima rasio ini secara berturut-turut adalah sebesar 2,165; 2,024; 3,725; -1,218; dan 1,994. Karena data dinilai tidak berdistribusi dengan normal, maka nilai median merupakan nilai statistik yang tepat untuk merepresentasikan populasi (Kamnikar et al., 2006).

### 3. Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Palembang

### a. Indeks Dimensi

Setelah melakukan perhitungan atas indeks indikator setiap rasio kondisi keuangan, maka selanjutnya dilakukan perhitungan atas indeks dimensi setiap rasio kondisi keuangan. Indeks dimensi rasio kondisi keuangan adalah rata-rata aritmatik dari indeks rasio-rasio kondisi keuangan (Ritonga, 2014). Perhitungan indeks dimensi ini diperlukan untuk dapat menentukan indeks komposit keuangan pemerintah daerah Kota Palembang.

**Tabel 13**  
**Indeks Dimensi Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Palembang**

Tahun	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas Jangka Panjang	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Fleksibilitas Keuangan	Solvabilitas Layanan
2016	0,17	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,93	1,00	1,00	0,54
2018	0,15	0,27	0,13	0,20	0,12	0,63
2019	0,00	0,39	0,62	0,18	0,32	0,86
2020	0,11	0,54	0,29	0,29	0,29	0,85

Sumber: Data yang diolah, 2022

### b. Indeks Kondisi Keuangan (IKK)

Setelah melakukan perhitungan atas indeks indikator setiap rasio kondisi keuangan dan indeks dimensi dari setiap rasio kondisi keuangan, maka selanjutnya dilakukan perhitungan atas indeks kompositnya. Indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah adalah rata-rata tertimbang dari indeks-indeks dimensinya (Ritonga, 2014).

**Tabel 14**  
**Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang**

Tahun	Indeks Kondisi Keuangan
2016	0,077
2017	0,942
2018	0,229
2019	0,354
2020	0,374

Sumber: Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang bersifat fluktuasi. Nilai indeks komposit paling tinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 0,942, dan nilai indeks komposit paling rendah terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 0,077.

## B. Pembahasan

### 1. Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Palembang

#### a. Solvabilitas Jangka Pendek

Peningkatan nilai rasio solvabilitas jangka pendek yang terjadi pada tahun 2017 disebabkan oleh rendahnya nilai kewajiban lancar yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang pada saat itu, sehingga hal ini menyebabkan nilai aset lancar yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang lebih banyak

dibandingkan dengan nilai kewajiban lancar. Selanjutnya, terjadi pula kenaikan pada nilai realisasi kas dan setara kas pada tahun 2017. Dapat dikatakan bahwa nilai rasio solvabilitas jangka pendek yang semakin menurun menandakan bahwa jumlah kas yang menganggur (*idle cash*) semakin sedikit, namun sebaliknya kenaikan nilai rasio solvabilitas jangka pendek menandakan bahwa semakin banyak pula jumlah *idle cash*. Menurut (Maizunati, 2017), nilai solvabilitas jangka pendek yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa belum optimalnya alokasi aset yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, yang menyebabkan banyak kas yang menganggur (*idle cash*) pada saat pembukuan akhir tahun.

Kemudian, berdasarkan data yang didapatkan maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020 pemerintah Kota Palembang tidak melakukan aktivitas investasi jangka pendek, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan bagian neraca yang sejak tahun 2018 sudah tidak menampilkan lagi bagan akun untuk investasi jangka pendek (LHP LKPD Kota Palembang Tahun 2016-2020). Sehingga, sumber aset lancar yang dapat diandalkan oleh pemerintah Kota Palembang untuk mengatasi kewajibannya berasal dari kas dan setara kas dan juga piutang yang dimilikinya.

#### **b. Solvabilitas Jangka Panjang**

Peningkatan nilai rasio yang cukup tinggi yang terjadi pada tahun 2017 disebabkan karena nilai aset pemerintah Kota Palembang mengalami peningkatan hampir dua kali lipatnya sedangkan, total kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat. Hal ini menyebabkan nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang untuk menjamin kewajibannya meningkat drastis. Selanjutnya, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 nilai rasio solvabilitas jangka panjang menunjukkan tren meningkat namun tidak berlebihan seperti yang terjadi pada tahun 2017. Menurut (Priyono, 2018) hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang secara umum memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Kemudian, perhitungan atas rasio solvabilitas jangka panjang di Kota Palembang hanya dapat dilakukan pada rasio B dikarenakan, pada tahun 2016 hingga tahun 2020 pemerintah Kota Palembang tidak melakukan aktivitas investasi jangka panjang, sehingga perhitungan atas rasio A dengan nilai investasi jangka panjang sebagai penyebutnya tidak dapat dilakukan (LHP LKPD Kota Palembang Tahun 2016-2020). Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan bagian neraca pemerintah Kota Palembang tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian, pada laporan keuangan bagian neraca ini juga sudah tidak menampilkan lagi rincian atas ekuitas, sehingga nilai ekuitas dana investasi tidak diketahui besarnya. Hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya perhitungan atas rasio C.

#### **c. Solvabilitas Anggaran**

Nilai rasio solvabilitas anggaran yang berfluktuasi ini disebabkan karena pada tahun 2016 hingga tahun 2020 nilai realisasi dari pendapatan dan belanja pada pemerintahan Kota Palembang masih berfluktuasi. (Maizunati, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penurunan nilai rasio solvabilitas anggaran dapat disebabkan oleh lebih besarnya pertumbuhan pendapatan DAK dan belanja operasional dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Menurut (Priyono, 2017) total belanja yang terus naik namun tidak disertai dengan naiknya pendapatan akan menyebabkan nilai anggaran pemerintah daerah melemah.

Walaupun nilai solvabilitas anggaran pada pemerintah daerah Kota Palembang berfluktuasi, akan tetapi nilai rasio ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang masih memiliki jumlah pendapatan yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya karena tidak ada nilai rasio yang di bawah nilai 1. Menurut (Priyono, 2017) sebuah pemerintahan daerah akan mengalami kesulitan untuk mendanai kegiatan operasionalnya apabila nilai rasio solvabilitas anggarannya berada di bawah 1.

#### **d. Kemandirian Keuangan**

Peningkatan nilai rasio kemandirian keuangan pada tahun 2017 yang cukup tinggi dibandingkan atas peningkatan nilai rasio tahun lainnya disebabkan karena adanya kenaikan yang cukup tinggi pada nilai realisasi penerimaan PAD pada pemerintahan daerah Kota Palembang. Nilai rasio kemandirian keuangan yang berfluktuasi ini disebabkan karena pada tahun 2016 hingga tahun 2020 nilai realisasi dari pendapatan dan belanja pada pemerintahan Kota Palembang masih berfluktuasi. Akan tetapi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 nilai rasio kemandirian keuangan menunjukkan tren meningkat. Menurut (Maizunati, 2017) hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2018 hingga tahun 2020 pemerintah daerah Kota Palembang sudah cukup baik dalam meningkatkan pendapatan dari eksplorasi sumber pendanaan baru.

Kenaikan nilai ini dapat lebih ditingkatkan dengan cara pemerintah daerah Kota Palembang harus lebih mengoptimalkan kegiatan ekonomi dari sektor yang dinilai memiliki potensi di Kota Palembang seperti contohnya industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan yang memiliki nilai tertinggi pada postur PDRB Kota Palembang berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS. Walaupun mengalami tren meningkat pada tiga tahun terakhir, akan tetapi dapat dikatakan bahwa nilai rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Palembang masih rendah. Menurut (Priyono, 2017) rendahnya rasio kemandirian ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi atas dana transfer dan dana perimbangan.

#### **e. Fleksibilitas Keuangan**

Peningkatan nilai rasio fleksibilitas keuangan yang cukup tinggi yang terjadi pada tahun 2017, disebabkan karena nilai realisasi total kewajiban pada pemerintahan Kota Palembang mengalami penurunan lebih dari dua kali lipatnya dibandingkan dengan realisasi total kewajiban pada tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan nilai pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah kota Palembang untuk menjamin kewajibannya meningkat drastis. Kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2020 nilai rasio fleksibilitas keuangan pemerintah daerah kota Palembang menunjukkan tren meningkat walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Menurut (Maizunati, 2017) penurunan nilai fleksibilitas keuangan ini dapat disebabkan karena kenaikan pertumbuhan persentase kewajiban dan pendapatan DAK yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan persentase total pendapatan.

Kemudian, perhitungan atas rasio fleksibilitas keuangan di Kota Palembang hanya dapat dilakukan pada rasio B dan rasio D dikarenakan, pada tahun 2016 hingga tahun 2020 pemerintah Kota Palembang tidak melakukan aktivitas investasi jangka panjang, akibatnya pada laporan keuangan bagian neraca juga tidak menampilkan bagan akun pembayaran pokok pinjaman (LHP LKPD Kota Palembang Tahun 2016-2020). Hal ini menyebabkan perhitungan atas rasio A dengan nilai pembayaran pokok pinjaman sebagai penyebutnya tidak dapat dilakukan. Kemudian, perhitungan atas rasio C dengan nilai kewajiban jangka panjang sebagai penyebutnya juga tidak dapat dilakukan.

#### **f. Solvabilitas Layanan**

Nilai rasio solvabilitas layanan yang berfluktuasi tetapi menunjukkan tren yang meningkat ini disebabkan karena pada tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah penduduk di Kota Palembang terus bertambah akan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Palembang mengalami penurunan. Berdasarkan nilai rasio solvabilitas layanan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang menunjukkan komitmen yang baik untuk bisa terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Hal ini dikarenakan menurut (Priyono, 2017), dengan naiknya nilai dari rasio solvabilitas layanan maka akan menggambarkan usaha dari pemerintah untuk terus bisa menyediakan pelayanan yang lebih baik lagi untuk penduduk pada pemerintahannya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya nilai rasio solvabilitas layanan pemerintah daerah Kota Palembang maka menggambarkan semakin meningkat pula kualitas atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Kemudian, perhitungan atas rasio solvabilitas layanan hanya bisa dilakukan terhadap rasio A, rasio B, rasio C, rasio D, dan rasio F dikarenakan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 pemerintah Kota Palembang tidak melaksanakan aktivitas belanja publik. Sehingga, perhitungan atas rasio E dengan menggunakan belanja publik sebagai pembilangnya tidak dapat dilakukan (LHP LKPD Kota Palembang Tahun 2016-2020). Hal ini dapat

dilihat pada laporan keuangan bagian laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Palembang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

## **2. Statistik Deskriptif atas Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Palembang**

### **a. Solvabilitas Jangka Pendek**

Nilai median dari rasio A, rasio B, dan rasio C secara berturut-turut adalah sebesar 0,200; 1,980; dan 1,560. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki 0,200; 1,980; dan 1,560 kali aset lancar yang dapat digunakan untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya. Menurut (Ritonga, 2014) belum bisa ditentukan berapa nilai yang ideal mengenai rasio solvabilitas jangka pendek atas suatu pemerintah daerah hingga saat ini. Akan tetapi, semakin tinggi nilai dari solvabilitas jangka pendek dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula jumlah aset lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dimana aset lancar ini dapat dimanfaatkan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut (Wardhani, 2017) penurunan nilai tren solvabilitas jangka pendek merupakan hal yang baik untuk kondisi keuangan pemerintah daerah, karena menggambarkan adanya perbaikan dalam pengelolaan aktiva lancar yang lebih difokuskan ke pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang memiliki solvabilitas jangka pendek yang baik, karena memiliki aset lancar yang cukup untuk menjamin kewajibannya. Walaupun begitu, nilai aset lancar yang ini terbilang cukup sedikit untuk dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya, karena pada dimensi rasio A nilai yang didapatkan masih dibawah 1,000.

### **b. Solvabilitas Jangka Panjang**

Nilai median dari rasio B adalah sebesar 52,750. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki jaminan sebesar 52,75 rupiah aset untuk setiap satu rupiah utang jangka panjang yang dimilikinya. Menurut (Ritonga, 2014) semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya ditunjukkan dengan semakin tinggi pula nilai dari rasio solvabilitas jangka panjang yang ada. Kemudian, semakin rendah nilai rasio akan menunjukkan semakin lemah juga kemampuan pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Menurut (Primawaty, 2017) adanya perubahan kebijakan akuntansi pada pemerintahan sejak tahun 2015, yaitu mulai berlakunya standar akuntansi berbasis akrual dapat menyebabkan penurunan jumlah aset dikarenakan mulai disajikannya penyusutan aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang memiliki solvabilitas jangka panjang yang baik karena memiliki jumlah aset yang cukup untuk menjamin kewajiban jangka panjangnya.

**c. Solvabilitas Anggaran**

Nilai median dari rasio A, rasio B, rasio C, dan rasio D secara berturut-turut adalah sebesar 1,170; 1,190; 2,100; dan 1,000. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki jumlah pendapatan sebesar 1,170; 1,190; 2,100; dan 1,000 kali yang dapat digunakan untuk membiayai belanja operasionalnya. Menurut (Ritonga, 2014) jumlah pendapatan pemerintah daerah yang ada untuk dapat dipakai guna membiayai belanja operasionalnya ditunjukkan oleh nilai dari rasio solvabilitas anggaran. Semakin tinggi nilai rasio maka, semakin banyak pula pendapatan yang dimiliki untuk menutupi biaya operasional pemerintah. Menurut (Primawaty, 2017) nilai median yang bernilai positif menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki jumlah pendapatan yang cukup untuk membiayai belanja operasionalnya. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kota Palembang memiliki solvabilitas anggaran yang baik, karena memiliki jumlah pendapatan yang cukup untuk digunakan dalam membiayai belanja operasionalnya.

**d. Kemandirian Keuangan**

Nilai median dari rasio A dan rasio B secara berturut-turut adalah sebesar 0,270 dan 0,270. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 hanya memiliki sekitar 27% dan 27% dari jumlah pendapatan yang berada di bawah kendalinya. Menurut (Ritonga, 2014) kontribusi pendapatan asli daerah untuk mendanai aktivitas pemerintah daerah ditunjukkan dengan nilai rasio kemandirian keuangan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin besar pula kontribusinya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa, semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik juga tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah. Menurut (Ritonga, 2014) nilai kemandirian keuangan yang lemah dapat disebabkan oleh kebijakan konstitusi yang mengatur tentang, segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas harus dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan penerimaan strategis dari PPh dan PPN di daerah tidak menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kemandirian keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang memiliki kemandirian keuangan yang dapat dikategorikan sedang, karena masih bergantung pada sumber pendanaan di luar kendali atau di luar pengaruh mereka.

**e. Fleksibilitas Keuangan**

Nilai Nilai median dari rasio B dan rasio D secara berturut-turut adalah sebesar 6,000 dan 11,460. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mempunyai fleksibilitas keuangan sebesar 6,000 dan 11,460 kali untuk mengatasi kejadian tidak terduga. Menurut (Ritonga, 2014) kemampuan pemerintah daerah untuk

mengatasi kejadian luar biasa ditunjukkan oleh nilai rasio fleksibilitas keuangan. Semakin tinggi nilai rasio maka, semakin baik pula fleksibilitas keuangan yang dapat berasal dari pihak eksternal maupun pihak internal dari organisasi pemerintah daerah. Menurut (Priyono, 2017) pemerintah daerah yang mendapatkan nilai dibawah 1 dalam fleksibilitas keuangannya maka pemerintah daerah tersebut memiliki kualitas fleksibilitas keuangan yang tidak memadai. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang memiliki fleksibilitas keuangan yang baik, karena mempunyai tingkat kapasitas pendapatan yang lebih besar dibandingkan kapasitas utang. Walaupun jumlah kapasitas pendapatan sudah dinilai cukup, tetapi sebaiknya pemerintah daerah Kota Palembang mulai meningkatkan fleksibilitas keuangannya untuk menghadapi kejadian tidak terduga dari internal ataupun eksternal pemerintahan daerah.

#### **f. Solvabilitas Layanan**

Nilai median dari rasio A, rasio B, rasio C, rasio D, dan rasio F secara berturut-turut adalah sebesar 8.492.001,150; 8.693.479,340; 7.268.230,860; 2.111.710,900; dan 528.060,910. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan rasio solvabilitasnya memiliki nilai ekuitas (rasio A) sebesar Rp. 8.492.001,15 untuk melayani setiap warganya, memiliki nilai aset (rasio B) sebesar Rp. 8.693.479,34 untuk melayani setiap warganya, memiliki nilai aset tetap (rasio C) sebesar Rp. 7.268.230,86 untuk melayani setiap warganya, melakukan aktivitas belanja (rasio D) sebesar Rp. 2.111.710,90 untuk melayani setiap warganya, dan melakukan aktivitas pembangunan/belanja modal (rasio F) sebesar Rp. 528.060,91 untuk melayani setiap warganya. Menurut (Maizunati, 2017) nilai rasio dimensi solvabilitas layanan bergantung pada perkembangan harga dan jumlah penduduk di suatu daerah. Pemerintah daerah perlu menjaga kestabilan dari pertumbuhan penduduk dan inflasi untuk menjaga agar nilai rasio solvabilitas layanan ini tetap tumbuh positif. Menurut (Suwarjuwono & Ritonga, 2017) untuk solvabilitas layanan ini tidak bisa ditentukan apakah kondisi solvabilitas layanan suatu daerah dalam keadaan yang baik atau tidak, karena tidak ada batasan yang membedakan antara kondisi solvabilitas layanan yang baik ataupun yang kurang baik. Namun, pada umumnya semakin baik pelayanan yang diberikan ditunjukkan dengan semakin tinggi pula nilai rasio rasio solvabilitas layanannya.

### **3. Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Palembang**

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka telah didapatkan kategori dari kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pengambilan kesimpulan atas kategori ini berdasarkan atas nilai z-score yang ada pada ketentuan penelitian yang dikembangkan oleh (Suwarjuwono & Ritonga, 2017).

**Tabel 15**  
**Kondisi Keuangan Pemerintah**  
**Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2020**

Peringkat	Tahun	IKK	Z-Score	Kategori
1	2017	0,942	1,668	Baik
2	2020	0,374	-0,064	Cukup
3	2019	0,354	-0,127	Cukup
4	2018	0,229	-0,507	Cukup
5	2016	0,077	-0,970	Cukup
Rata-rata			0,395	
Standar Deviasi			0,328	

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 sampai 2020 kondisi keuangan pemerintah Kota Palembang dapat diurutkan dengan peringkat sebagai berikut. Pada tahun 2017 kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang mendapatkan peringkat pertama dengan kategori baik dengan nilai IKK sebesar 0,942. Selanjutnya, pada tahun 2020 kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang mendapatkan peringkat kedua dengan kategori cukup dengan nilai IKK sebesar 0,374. Kemudian, pada tahun 2019 kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang mendapatkan peringkat ketiga dengan kategori cukup dengan nilai IKK sebesar 0,354. Pada tahun 2018 kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang mendapatkan peringkat keempat dengan kategori cukup dengan nilai IKK sebesar 0,229. Kemudian pada tahun 2016 kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang mendapatkan peringkat kelima dengan kategori cukup dengan nilai IKK sebesar 0,077.

### **Kesimpulan**

Berikut kesimpulan terkait penelitian yang dapat diambil yaitu dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang memiliki solvabilitas jangka pendek yang baik, karena memiliki aset lancar yang cukup untuk menjamin kewajiban lancarnya. Kemudian, pemerintah daerah Kota Palembang memiliki solvabilitas jangka panjang yang baik karena memiliki jumlah aset yang cukup untuk menjamin kewajiban jangka panjangnya. Kemudian, pemerintah daerah Kota Palembang memiliki solvabilitas anggaran yang baik, karena memiliki jumlah pendapatan yang cukup untuk digunakan dalam membiayai belanja operasionalnya. Kemudian, pemerintah daerah Kota Palembang memiliki kemandirian keuangan yang masuk dalam kategori sedang, karena masih bergantung pada sumber pendanaan di luar kendali atau di luar pengaruh mereka. Kemudian, pemerintah daerah Kota Palembang memiliki fleksibilitas keuangan yang baik, karena memiliki jumlah kapasitas pendapatan (setelah dikurangi belanja-belanja wajib dan pendapatan terikat) yang lebih besar dibandingkan kapasitas utang. Kemudian, tidak dapat dikatakan apakah nilai rasio solvabilitas layanan pemerintah daerah Kota Palembang sudah dalam kadar baik atautkah belum. Hal ini dikarenakan,

belum adanya batasan jelas yang dapat membedakan kondisi solvabilitas layanan yang baik dan kurang baik. Akan tetapi, semakin besar nilai solvabilitas layanan maka semakin baik pula kondisi solvabilitas layanan di pemda tersebut.

Berdasarkan perhitungan atas Indeks Komposit Kondisi Keuangan (IKK) yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selama tahun 2016 sampai tahun 2020 maka kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Palembang yang terbaik berada pada tahun 2017 dengan kategori "Baik" dan diikuti dengan tahun 2020, 2019, 2018, dan 2016 dengan kategori "Cukup".

## BIBLIOGRAFI

- Jusup, A. (2011). Haryono. Auditing (Pengauditing) I. [Google Scholar](#)
- Kamnikar, J. A., Kamnikar, E. G., & Deal, K. H. (2006). Assessing a state's financial condition. *The Journal of Government Financial Management*, 55(3), 30. [Google Scholar](#)
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 139–162. [Google Scholar](#)
- Primawaty, A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011–2015. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(1). [Google Scholar](#)
- Priyatno, D. (2018). SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum. Yogyakarta: Andi. [Google Scholar](#)
- Priyono, C. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011 sd 2015. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1). [Google Scholar](#)
- Ritonga, I. T. (2014). Analisis Laporan Keuangan Pemda. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [Google Scholar](#)
- Selatan, B. R. P. P. S. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun 2020. <http://bpkad.sumselprov.go.id/laporan-keuangan-provinsi/>
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111–130. [Google Scholar](#)
- Sofyan, M. (2019). Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Akademika*, 17(2), 115–121. [Google Scholar](#)
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). Keuangan di era otonomi daerah. Penerbit Andi. [Google Scholar](#)
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta, 28, 1–12. [Google Scholar](#)
- Suwarjuwono, P., & Ritonga, I. T. (2017). Analisis Tingkat Pengungkapan Akun Persediaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 173–188. [Google Scholar](#)
- Wardhani, N. W. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Bali, Ntb,

Aditya Mahendra, Faridah, Anggeraini Oktarida

Dan Ntt Tahun 2011-2015. Accounting and Business Information Systems Journal, 5(4). [Google Scholar](#)

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 14(1), 56–64. [Google Scholar](#)

---

**Copyright holder :**

Aditya Mahendra, Faridah, Anggeraini Oktarida (2022)

**First publication right :**

Jurnal Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

